

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan literatur

Sebelum dibuatnya sebuah penelitian, penulis perlu meninjau kembali penelitian terdahulu yang selaras dengan tema yang akan diangkat. Tinjauan penelitian ini bertujuan untuk digunakan sebagai landasan penelitian dan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan berbagai penelitian sebelumnya terkait *Non-Governmental Organisation* (NGO) termasuk Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam membantu mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Oleh karena itu kajian yang akan dilakukan terhadap beberapa jurnal melalui internet akan berfokus pada NGO, peran Serikat Buruh Indonesia, dan fenomena human trafficking.

perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia. Jutaan orang diperdagangkan setiap tahun, dan banyak dari mereka adalah anak-anak. perdagangan manusia memiliki dampak yang buruk terhadap korban, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan trauma. Dalam jurnal yang ditulis oleh *Lianto* dan *William Chang* dengan judul **“Manusia Memperdagangkan Manusia”** memberikan pemahaman terhadap berbagai bentuk perdagangan manusia di Indonesia, termasuk perdagangan seks, perdagangan tenaga kerja, dan perdagangan organ tubuh. Dengan menguraikan faktor-faktor pendorong perdagangan manusia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya

akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi *multi-faceted* untuk memerangi perdagangan manusia. Mereka merekomendasikan peningkatan kesadaran publik, penguatan penegakan hukum, dan penyediaan dukungan bagi para korban (Chang & Lianto, 2017).

Perbedaan mendasar dari penelitian ini terletak pada objek penelitian, penulis berfokus pada fenomena *Human trafficking* nya saja sedangkan dalam penelitian yang akan dibuat berfokus pada NGO yang menangani kasus *Human trafficking* sehingga terdapat kelemahan seperti penanganan langsung pada korban, pengalaman korban, dan kurangnya analisis kebijakan. Walaupun terdapat perbedaan pada objek penelitiannya, tetap saja penelitian terkait isu kontemporer seperti ini jarang sekali diangkat oleh akademisi terutama fenomena *Human trafficking*. Karena itu perlu adanya pembaharuan dalam sebuah penelitian

Selama dua decade terakhir kebutuhan dan kepentingan buruh migran lebih banyak lebih mendapat perhatian dari Organisasi non pemerintah atau *non-governmental organisation* (NGO) hal ini dikarenakan beberapa factor seperti serikat pekerja local yang lebih focus kepada permasalahan lokal saja. Jurnal dengan judul “*Migrant Labor NGOs and Trade Unions: A Partnership in Progress?*” karya M.Ford tahun 2006 membahas lebih dalam hubungan NGO dengan buruh migran dan serikat pekerja di Asia tenggara. Ford menyimpulkan bahwa kemitraan antara NGO, buruh migran, dan serikat pekerja memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak buruh migran dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun terdapat beberapa

tantangan, kemitraan ini memiliki potensi untuk membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan buruh migran (Ford, 2006).

Ford membahas hubungan NGO seperti *Asian Migrant Workers' Network* (AMWON) dan International Trade Union Confederation (ITUC) dengan buruh migran, walaupun sama-sama membahas NGO sebagai objek penelitiannya namun cakupan penelitiannya terlalu umum dan tidak terfokus pada satu organisasi saja point penting seperti membahas tantangan dan dampak juga kurang di jabarkan secara komperhensif oleh penulis, karenanya butuh adanya penelitian lanjutan yang berfokus dalam satu objek penelitian .

Pekerja migran Indonesia (PMI) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, mereka juga merupakan kelompok yang rentan dan sering mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Anggia, UD dan Teuku, R dalam jurnal dengan judul ***“Indonesian Migrant Domestic Workers and Sustainable Development Goals: Feasible Policy and Practices”*** membahas bahwa sustainable development goals (SDGs) menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi berbagai isu yang dihadapi PMI. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka dapat berkontribusi secara penuh pada pembangunan berkelanjutan. SDGs sendiri merupakan program yang dikembangkan oleh PBB untuk mencapai masa depan yang lebih baik (Anggia & Teuku, 2018).

Artikel ini membahas pentingnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perkembangan suatu bangsa terutama di Indonesia, karena itu pemerintah di dorong untuk memberikan perhhatian lebih bagi PMI karena rentannya

eksploitasi yang terjadi bagi para PMI. Meskipun memiliki persamaan membahas isu terkait pekerja buruh migran penelitian ini memiliki perbedaan karena pembahasannya berfokus pada program SDGs yang dibuat oleh PBB, sedangkan penelitian yang akan dibuat berfokus pada SBMI sebagai media advokasi bagi para PMI dan mengatasi isu-isu didalamnya.

Pemerintah di berbagai negara seringkali menjadi actor utama yang menyulut terjadinya sebuah masalah yang merugikan masyarakatnya sendiri, karena kebijakan yang dibuat secara tergesa gesa dan tidak mempedulikan kalangan yang lain salah satunya kaum perempuan. Dalam sebuah jurnal dengan judul *“Human Trafficking in Indonesia: Rethinking the New Order's Impact on Exploitative Migration of Indonesian Women”* oleh Kenji Kimura tahun 2006 membahas kebijakan di masa orde baru yaitu program transmigrasi dan penekanan pada pembangunan ekonomi yang mendorong migrasi yang rentan terhadap eksploitasi pada kaum perempuan di Indonesia saat itu. Kenji perargumen pembangunan ekonomi saat itu menciptakan tenaga kerja murah yang membuka peluang bagi perdagangan manusia. Dampak kebijakan ini dianggap memfasilitasi jaringan perdagangan manusia yang kompleks karena melibatkan agen pencari, pejabat korup, dan pemilik bisnis. Eksploitasi perempuan Indonesia seringkali mengalami kondisi kerja yang keras, pelecehan, dan kekerasan. (Kimura, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh kimura memiliki keterbatasan karena fokus penelitiannya pada era orde baru, penelitian ini tidak mencerminkan situasi Indonesia saat ini, walaupun begitu penelitian ini menjadi dasar dan memberikan pemahaman terhadap akar permasalahan fenomena perdagangan

manusia di Indonesia. Penelitian ini juga membahas bahwa pemerintah tidak selalu menjadi aktor yang bisa menangani permasalahan di negaranya justru pemerintah menjadi pihak yang berkontribusi dalam perkembangan masalah di suatu negara.

Di Indonesia terdapat banyak organisasi non-pemerintah yang berdiri sendiri untuk memperjuangkan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya, terutama organisasi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). Fenny Sumardiani dalam penelitiannya dengan judul **“Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”** membahas lebih dalam organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak-hak buru migran di kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini pembahasan terkait upaya SBMI seperti pendampingan, Pendidikan, pemberdayaan, dan pelatihan yang dilakukan SBMI untuk mengurangi resiko tindakan eksploitasi oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang (Sumardiani, 2014).

Penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yaitu Serikat Buruh migran Indonesia(SBMI) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak buruh migran. Namun penelitian ini Batasan masalahnya berfokus pada peran SBMI di kabupaten Kendal sehingga temuannya tidak dapat digeneralisir ke daerah lain di Indonesia. Lalu bahasan terkait kendala yang dihadapi juga kurang dijelaskan secara komperhensif. Perbedaan lainnya terdapat pada taun

penelitiannya, penelitian ini dibuat pada tahun 2014 sehingga perlu adanya pembaharuan penelitian termasuk pembaharuan informasi data.

*Table 2 Tinjauan Literatur*

no	Judul	Penulis	<i>Mind finding</i>
1	<b>Manusia Memperdagangkan Manusia</b>	Lianto dan William Chang	<p>Penelitian ini menunjukkan beberapa motivasi pelaku, seperti keuntungan finansial, ketidakpedulian terhadap korban, dan keinginan untuk memiliki kuasa.</p> <p>Dampak psikologis pada korban pun tak kalah mengerikan, termasuk trauma, depresi, PTSD, dan kehilangan identitas. Persepsi masyarakat yang beragam, dari kurangnya kesadaran hingga stigmatisasi dan ketidakpercayaan, menjadi tantangan tersendiri.</p>
2	<i>Migrant Labor NGOs and Trade Unions: A</i>	M.Ford	Pergeseran paradigma dalam dua dekade terakhir, di mana LSM mengambil peran dominan dalam

	<p><b><i>Partnership in Progress?</i></b></p>		<p>advokasi buruh migran dibandingkan serikat pekerja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, serikat pekerja mulai menunjukkan ketertarikan terhadap isu ini, membuka jalan bagi kemitraan yang lebih erat.</p> <p>Ford mencontohkan kemitraan sukses antara Jaringan Buruh Migran Asia (AMWON) dan Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) sebagai bukti nyata kolaborasi ini. Kemitraan ini, meskipun diwarnai berbagai tantangan seperti perbedaan mandat dan sumber daya, berpotensi menghasilkan dampak positif bagi buruh migran.</p>
3	<p><b><i>Indonesian Migrant Domestic Workers and Sustainable Development Goals:</i></b></p>	<p>Anggia, U,D dan Teuku, R</p>	<p>SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah 17 tujuan global yang dibuat oleh PBB untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang di planet ini. Tujuan</p>

<p><b><i>Feasible Policy and Practices</i></b></p>	<p>ini saling terkait dan bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah penting, seperti kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, dan ketidakadilan.</p> <p>Setiap tujuan memiliki target dan indikator yang spesifik untuk diukur kemajuannya. Untuk mencapai SDGs, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, dan individu.</p> <p>Contohnya, Program Pangan Dunia (WFP) yang bekerja untuk memerangi kelaparan, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) yang menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak, dan aktivis seperti Greenpeace yang melindungi lingkungan.</p> <p>Setiap orang dapat memainkan peran dalam mencapai SDGs. Dengan memilih produk yang berkelanjutan,</p>
--	---



			<p>menghemat energi dan air, mendukung organisasi yang relevan, menyebarkan informasi tentang SDGs, dan menjadi sukarelawan, kita dapat berkontribusi untuk membangun dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera.</p> <p>SDGs adalah rencana ambisius, namun dengan kerja sama dan komitmen global, kita dapat mewujudkannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.</p>
4	<p><b><i>Human Trafficking in Indonesia: Rethinking the New Order's Impact on Exploitative Migration of Indonesian Women</i></b></p>	<p>Kenji Kimura</p>	<p>Kebijakan Orde Baru, seperti transmigrasi dan fokus pada pembangunan ekonomi, mendorong migrasi eksploitatif perempuan Indonesia dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Jaringan perdagangan manusia yang kompleks memfasilitasi perdagangan ini,</p>

			<p>dengan para perempuan mengalami kondisi kerja keras, pelecehan, dan kekerasan. Penelitian Kimura menunjukkan hubungan antara kebijakan Orde Baru dan perdagangan manusia, menyoroti kerentanan perempuan Indonesia dan konsekuensi negatif bagi korban. Meskipun penelitian ini berfokus pada era Orde Baru dan tidak membahas semua bentuk perdagangan manusia, penelitian ini memberikan wawasan penting dan mendorong penelitian lebih lanjut untuk memahami situasi saat ini dan dampak perdagangan manusia secara menyeluruh.</p>
5	<p><b>Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</b></p>	<p>Fenny Sumardiani</p>	<p>Melalui pendampingan hukum, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan, SBMI membantu TKI menyelesaikan masalah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mencapai kesejahteraan. Peran krusial SBMI ini</p>

			tergambar dalam penelitian di Kabupaten Kendal, namun fokus pada satu daerah ini membatasi generalisasi temuan.
--	--	--	---

Sumber: Peneliti

Berdasarkan analisis dari lima tinjauan literatur di atas memberikan pemahaman peran NGO dalam membantu mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Salah satunya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam fenomena *Human Trafficking*. Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa perdagangan manusia sebagai masalah serius di Indonesia, dengan berbagai bentuk eksploitasi dan dampak buruk pada korban. NGO berperan penting dalam membantu korban TPPO, melakukan advokasi, dan membangun kemitraan untuk memperkuat upaya anti-TPPO. Studi kasus SBMI menunjukkan perannya dalam membantu buruh migran yang mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian, seperti fokus pada fenomena perdagangan manusia secara umum dan kurangnya penelitian mendalam tentang peran NGO dan SBMI. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami peran NGO secara lebih mendalam dan memperkuat upaya anti-TPPO di Indonesia.

## 2.2. Kerangka Teoritis/konseptual

### 2.2.1. Global Governance

Global Governance di definisikan sebagai proses kolaborasi multi aktor yang melibatkan berbagai pihak bukan hanya aktor negara, tetapi melibatkan aktor non-negara seperti organisasi internasional (OI), perusahaan multi nasional (MNC), Organisasi non-pemerintah, bahkan juga melibatkan individu yang berperan penting dalam prosesnya. Karena itu kolaborasi ini terjadi di tingkat lokal, nasional, regional, hingga global. Isu yang bisa dicakup juga sangat beragam seperti permasalahan global (isu iklim, terorisme, kemiskinan, HAM, dll). Yang terpenting konsep ini lebih dari sekadar menyelesaikan masalah tapi juga mencakup mekanisme, aturan, dan norma yang mengatur interaksi antar aktor dalam isu-isu global. Konsep ini tidak statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan munculnya isu-isu baru. Hal ini mendorong munculnya bentuk-bentuk baru sebuah konsep dan transformasi mekanisme, aturan, dan norma yang ada. (Baylis et al., 2020)

Dalam kerangka konsep Global Governance, NGO menjadi aktor penting dalam memerangi perdagangan manusia dan tata kelola global. Mereka berperan dalam pencegahan melalui edukasi, program pengembangan, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan menyediakan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan konseling. NGO juga berperan dalam advokasi, mendorong kebijakan dan undang-undang yang lebih kuat serta meningkatkan akuntabilitas para pelaku perdagangan manusia. Kolaborasi mereka dengan pemerintah, organisasi internasional, dan aktor lainnya menjadi kunci dalam memperkuat upaya kolektif. Kontribusi NGO dalam konsep Global Governance meliputi partisipasi

dalam pengambilan keputusan, penyediaan keahlian dan sumber daya, pemantauan kemajuan, serta meningkatkan kesadaran publik. Penelitian tentang peran NGO dalam tata kelola perdagangan orang menjadi penting untuk memahami kontribusi mereka, praktik terbaik, dan pengembangan strategi yang efektif. Secara keseluruhan, NGO memainkan peran fundamental dalam memerangi perdagangan manusia.(UNODC, 2022)

### **2.2.2. English school**

English School merupakan pendekatan yang memiliki sejarah panjang dan beragam dalam studi hubungan internasional. Dimulai dari pembentukan Komite Inggris tentang Teori Politik Internasional pada akhir 1950-an, English School telah mengalami perkembangan yang terbagi dalam empat fase utama. Pada awalnya, fokus utama adalah pengembangan konsep masyarakat internasional yang berbagi aturan dan institusi untuk mengatur hubungan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, English School berkembang menjadi pendekatan yang lebih holistik, mencakup konsep masyarakat dunia dan mempertimbangkan hubungan antara pluralisme dan solidarisme dalam masyarakat internasional. Teori English School dalam ilmu hubungan internasional adalah salah satu pendekatan yang menekankan pentingnya elemen-elemen sosial dan norma-norma dalam memahami dinamika hubungan internasional. Teori ini sering disebut juga sebagai British Institutionalism. Untuk memahami teori ini dalam konteks ilmu hubungan internasional,

kita dapat membahas definisi, konsep utama, dan implementasinya (Buzan, 2001).

Teori English School menggabungkan pendekatan-pendekatan realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, dengan fokus pada konsep-konsep sosial dan sejarah. Menurut Barry Buzan, salah satu tokoh utama teori ini, English School melihat hubungan internasional melalui tiga pilar utama: internasionalis society (masyarakat internasional), Sistem Internasional (International System), dan World Society (masyarakat dunia). teori ini membantu menganalisis bagaimana norma-norma global menyebar dan mempengaruhi perilaku negara dan aktor non-negara. Pengaruh organisasi internasional dan NGO dalam mempromosikan hak asasi manusia atau perlindungan lingkungan adalah contoh penerapan perspektif English School. (Buzan, 2004).

Dalam konteks peran NGO dalam memerangi human trafficking, terutama dalam teori English School, peran mereka sangat penting dalam membentuk norma-norma anti-perdagangan manusia yang diterima secara internasional. Selain itu, peran NGO dalam meningkatkan kesadaran publik tidak dapat diabaikan. Mereka melakukan kampanye edukasi yang bertujuan untuk memperjelas dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dari perdagangan manusia, membangun dukungan publik, dan menggerakkan tindakan dari pemerintah dan institusi terkait. Tidak hanya itu, NGO juga memberikan bantuan langsung kepada korban perdagangan manusia dengan menyediakan layanan rehabilitasi, pemulihan sosial, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Dengan kehadiran mereka yang

kuat dan advokasi yang berkelanjutan, NGO berperan penting dalam membentuk kebijakan internasional yang lebih efektif dalam memerangi perdagangan manusia dan mengadvokasi hak-hak korban. Keseluruhan, peran NGO seperti ini membuktikan keberhasilan teori English School dalam menjembatani antara aktor non-negara dan masyarakat internasional dalam menangani masalah global yang kompleks (Kara, 2009)

### **2.2.3. Human Security**

Awal mula kemunculan teori human security merupakan norma yang berkembang dari urgensi atas hak asasi manusia (HAM) dan sebagai kritikan bagi teori dan paradigma tradisional yang berpusat pada pembahasan keamanan sebuah negara. Para penggiat teori ini beranggapan bahwa manusia sebagai individu yang hidup dalam tata kelola sebuah bangsa juga merupakan bagian penting dari keamanan itu sendiri, human security merupakan sebuah upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu dalam masyarakat (*society*) juga tanpa mengalihkan pada isu keamanan yang lain dengan focus pada aspek-aspek seperti kesehatan, ekonomi, pangan, lingkungan, social, dan politik. Mereka juga menjelaskan bahwa kesejahteraan ini juga perlu dibentuk dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Johns, 2014) .

Human Security menekankan perlunya melindungi individu-individu dari ancaman yang berasal dari berbagai dimensi, seperti konflik bersenjata, kemiskinan, penyakit, kelaparan, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu poin penting dalam teori Human Security

adalah bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan negara-negara dan kekuatan militer, tetapi juga dengan kesejahteraan individu-individu secara langsung. Ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kehidupan yang layak, makanan yang cukup, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, lingkungan yang bersih, dan keadilan sosial. Perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat aktor-aktor yang bertanggung jawab atas penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan manusia, termasuk negara, organisasi internasional, NGO, bahkan kepada individu (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Dalam konteks Human trafficking NGO menempati peran penting karena mereka melengkapi peran negara dalam melindungi individu yang rentan terhadap perdagangan orang, NGO juga dapat menjangkau kaum marjinal yang luput dari perhatian pemerintah. Ngo juga seringkali bersentuhan langsung dengan para korban dalam artian memberikan pelayanan tanpa di batasi oleh aturan birokrasi pemerintah.

#### **2.2.4. Human Trafficking Governance**

Human trafficking governance dalam ubungan internasional mengacu pada upaya global dalam mengatsai dan memberantas *Human trafficking* melalui framework hukum, kebijakan, praktik yang melibatkan berbagai aktor termasuk negara, organisasi internasional, NGO dll. Konsep ini meberikan pemahaman perlunya koordinasi Internasional, kebijakan nasional yang tepat, penegakan hukum, serta perlindungan pada korban. Kunci utama dari implementasi konsep Human trafficking governance



adalah Palermo Protokol sebagai protokol PBB yang diadopsi mulai 15 november 2000 di Palermo, Italia. Protokol ada karena kekhawatiran global di era 90-an sehingga mendorong PBB untuk mengambil tindakan. Isi dari protokol ini untuk mencegah, menekan, dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak (Nações, 2000).

Kerjasama antara negara-negara sangat penting untuk memberantas perdagangan manusia yang sering kali bersifat lintas batas, termasuk berbagi informasi, bantuan hukum timbal balik, dan operasi bersama antara lembaga penegak hukum. Pertukaran data intelijen, bantuan hukum untuk ekstradisi dan penuntutan lintas negara, serta operasi gabungan seperti Joint Investigation Teams (JITs) adalah elemen kunci dalam upaya ini. Organisasi internasional seperti PBB, IOM, dan INTERPOL, serta NGO, memainkan peran vital dalam mengadvokasi hak-hak korban, menyediakan bantuan teknis dan sumber daya, serta melakukan kampanye kesadaran publik. Mereka bekerja untuk memastikan hak-hak korban, memberikan pelatihan dan dukungan kepada negara, dan meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda serta risiko perdagangan manusia (Anna T, 2010).

#### **2.2.5. Teori peran (Role Theory)**

Teori peran (role theory) dipahami sebagai sebuah kerangka kerja yang memungkinkan analisis perilaku individu atau kelompok dalam sistem sosial. Dalam hal ini, teori peran menjadi alat untuk membedah dan menganalisis bagaimana aktor-aktor negara dan non-negara memainkan

peran-peran tertentu dalam interaksi mereka di dunia internasional. Contohnya bagaimana menganalisis peran suatu aktor dalam hubungan internasional (Harnisch et al., 2011).

Dalam konteks untuk menganalisis peran NGO teori peran dapat digunakan sebagai aktor hubungan internasional. Mereka sering berperan sebagai pelaku yang memperjuangkan isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, perdamaian, dan pembangunan. Dalam konteks ini, teori peran membantu kita memahami bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh NGO mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Teori peran juga dapat digunakan untuk menganalisis identitas yang dibangun. Misalnya, beberapa NGO mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai advokat hak asasi manusia global, dalam penelitian ini membahas Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai organisasi yang mengadvokasi korban dengan pihak berwajib, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada isu lingkungan atau pembangunan. Identitas ini membentuk cara NGO berinteraksi dengan aktor-aktor lain di dunia internasional. Sebagian besar juga terlibat dalam diplomasi kelembagaan, baik melalui partisipasi dalam konferensi internasional, negosiasi, atau advokasi di forum-forum global. Dengan menerapkan teori peran, kita dapat menganalisis bagaimana peran-peran ini berubah seiring waktu, atau bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan dalam sistem internasional.

NGO juga berkontribusi pada pembentukan sebuah norma internasional. Menerapkan teori peran dapat membantu kita memahami

bagaimana peran NGO dalam menciptakan norma-norma baru atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan di tingkat global.

#### **2.2.6. Non-Governmental Organisation**

Peter Willetts dalam buku dengan judul *Non-Governmental Organizations in World Politics: The Construction of Global Governance* mendefinisikan NGO sebagai organisasi yang bersifat sukarela, independen dari pemerintah, dan tidak mencari keuntungan, NGO umumnya bersifat independen dari pemerintah dan partai politik. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara bebas tanpa tekanan politik dan fokus pada misi mereka. Mereka berfokus pada berbagai isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan, dan perdamaian. NGO berkontribusi dalam membentuk tata kelola global. NGO juga terlibat dalam berbagai forum internasional, termasuk konferensi PBB, dan mereka bekerja untuk mempengaruhi kebijakan global melalui lobi, advokasi, dan kampanye. Kerjasama dan konflik antara berbagai aktor ini dapat mempengaruhi hasil kebijakan global. NGO sering bekerja di sektor pembangunan, membantu menyediakan layanan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka dapat berfungsi sebagai pelengkap atau bahkan pengganti di tempat di mana pemerintah tidak hadir atau tidak efektif. Mereka juga menyediakan layanan langsung kepada individu dan komunitas, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan teknis. Mereka sering bekerja di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah atau organisasi internasional lainnya (Willetts, 2011).

Dalam penelitian ini Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menjadi NGO yang berperan sebagai organisasi yang melakukan advokasi, penyedia layanan, dan pemerhati isu *human trafficking* di Indonesia terutama kepada para pekerja buruh migran yang erring menjadi korban dari kasus kasus seperti ini. SBMI juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menjangkau bagian bagian yang sulit tersentuh oleh pemerintah supaya mengurangi dan mencegah isu ini semakin besar.

### 2.3. Asumsi

Asumsi dalam konteks penelitian mengacu pada keyakinan atau kondisi dasar yang diterima peneliti sebagai sesuatu yang benar atau valid, meskipun mungkin tidak secara langsung dibuktikan atau diverifikasi melalui penelitian itu sendiri. Dengan merinci hasil penelitian, penulis dapat menyajikan temuan yang kuat dan memvalidasi asumsi, memberikan kontribusi pada pengetahuan dalam bidang tersebut. Oleh sebab itu penulis meringkaskan asumsi yaitu sebagai berikut “**Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai *Non-Governmental Organisation* (NGO) dalam *framework human trafficking governance* memiliki kontribusi, berperan penting, bahkan sering kali menjadi kunci dalam menangani perdagangan buruh migran Indonesia**”.

## 2.4. Kerangka Analisis

Gambar 4 kerangka analisis

